



Judul : Perbaiki jalan daerah, anggaran IJD perlu ditambah
Tanggal : Selasa, 07 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perbaiki Jalan Daerah Anggaran IJD Perlu Ditambah

SENAYAN mendorong Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Pasalnya, masih banyak ruas jalan dan jembatan daerah yang butuh perhatian ekstra dari pusat, khususnya infrastruktur yang jadi kewenangan provinsi serta kabupaten/kota.

Anggota Komisi V DPR Abdul Hadi mengatakan, pembahasan APBN 2027 merupakan momentum tepat memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur daerah lebih merata. Jalan merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apalagi, tingkat kemantapan jalan di berbagai daerah saat ini ternyata masih harus ditingkatkan.

Dari laporan terbaru yang diterimanya, kemantapan jalan provinsi baru sekitar 80 persen, sedangkan kabupaten 60 persen. Untuk infrastruktur area kota, baru mencapai 80 persen dan masih banyak ialur rusak. "Kondisi itu tentu membutuhkan sentuhan lebih besar secara langsung dari Pusat," katanya, Jumat (3/7/2026).

Selain itu, kata Hadi, dalam beberapa tahun terakhir, daerah tidak lagi memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur jalan seperti sebelumnya. Kondisi itu berpotensi mengurangi kemampuan mereka menangani wilayah masing-masing. Makanya, program IJD yang telah diluncurkan jadi langkah positif membantu perbaikan berkelanjutan.

Namun, cakupan program itu

masih harus terus diperluas agar mampu menjawab beragam kebutuhan masyarakat pelosok. Terutama bagi warga di wilayah perkampungan serta daerah terpencil yang posisinya sangat jauh dari pusat perkotaan. Perhatian penuh sangat diharapkan supaya akses mobilitas warga sekitar bisa berjalan lancar kembali.

Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur akan semakin dirasakan langsung, terutama masyarakat miskin. "PKS siap memberikan dukungan penuh jika fokus Pemerintah benar-benar ditujukan langsung pada wilayah tertinggal itu," ucapnya.

Senada, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebut, pelaksanaan IJD bisa jadi solusi tepat membantu berbagai kawasan dengan keterbatasan fiskal. Karena penurunan transfer ke daerah dipastikan membuat kemampuan wilayah membiayai pembangunan fasilitas umum ikut terdampak. Makanya, Pemerintah Pusat harus memperbesar dukungan IJD.

Menurutnya, alokasi anggaran Program IJD harus ditingkatkan demi menyiasati persoalan mendasar tentang keterbatasan fiskal daerah. Langkah strategis itu dirancang khusus guna membantu wilayah yang tengah mengalami kesulitan anggaran. Terutama saat mencoba membiayai proses pembangunan sekaligus pemeliharaan berbagai jalan utama masyarakat setempat.

Tambahan dukungan dana sangat diharapkan agar keterbatasan kemampuan fiskal kawasan tidak merusak kualitas infrastruktur yang sudah ada. ■ **PYB**